

ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN PER KAPITA, TINGKAT PENGANGGURAN, IPM DAN PERTUMBUHAN PENDUDUK TERHADAP KEMISKINAN DI JAWA TENGAH TAHUN 2009-2013

Oleh:

Nurul Fadlillah¹⁾, Sukiman¹⁾ dan Agustin Susyatna Dewi¹⁾

¹⁾ Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Soedirman
Email: nufa953@gmail.com

ABSTRACT

Poverty is a problem that cannot be solved in a short time, this is because poverty is a complex problem that is caused from many dimensions (economic dimension, the dimension of education, health, social political dimension, etc). The purpose of this research is to know the influence of variable income per capita, the unemployment rate, the human development index, and population growth against the number of poor population in Central Java. This research used the method of survey and is a descriptive research. Analytical tools used in this research are a model and test panel data regression elasticity. Based on capita income results showed a negative and significant effect against the number of poor population in Central Java, the open unemployment rate is positive and significant effect against the number of poor population in Central Java, the human development index and significant negative effect against the number of poor population in Central Java, and influential population growth is negative but not significant. Of the three variables, which have a significant coefficient of per-capita income is, so the income per capita is the most elastic against poor population. The implications of the above conclusions, to increase the per-capita income one of them by holding the program right on target that operates on the poor through developing a cottage industry. To lower the unemployment rate open one of the efforts that the Government can do that is by lowering the interest rate benchmark, so that hopefully will spur producers to do lending to business expansion. To improve the human development index, the effort can do Government provides services in the education sector for free especially for the poor, while in the field of health can be conducted free health care clinics in particular, reproduce on poor villagers and left behind. As for population growth, although it has no effect against a significant number of inhabitants of the poor, Governments still need to pay attention to the rate of population growth especially in the counties (rural areas).

Keywords: *Poverty, Income Per Capita, Open Unemployment Rate, Human Development Index, Population Growth.*

PENDAHULUAN

Menurut Badan Pusat Statistika (BPS), kemiskinan adalah ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar (makanan dan bukan makanan) yang minimum untuk hidup layak: *basic needs approach*. Dimana untuk mengukur kemiskinan menurut BPS adalah dengan menggunakan pendapatan, yakni ditentukan dengan garis kemiskinan yang telah ditetapkan oleh BPS untuk masing-masing daerah. Sedangkan rumah tangga miskin menurut BPS, adalah rumah tangga yang pendapatannya di bawah garis kemiskinan yang ditetapkan BPS (Lampiran 1).

Kemiskinan selama ini lebih sering dikaitkan dengan dimensi ekonomi karena dimensi inilah yang paling mudah diamati, diukur dan diperbandingkan. Padahal kemiskinan juga berkaitan dengan berbagai dimensi antara lain: dimensi sosial, budaya, sosial politik, lingkungan (alam dan geografis), kesehatan, pendidikan, agama, dan budi pekerti. Menelaah kemiskinan secara multidimensional sangat diperlukan untuk merumuskan kebijakan pengentasan

kemiskinan. Sehingga program pengentasan kemiskinan diharapkan dapat berjalan secara komperhensif dan berkesinambungan (konsisten) (Suryawati,2005).

Masalah kemiskinan adalah masalah “klasik”: pertumbuhan versus distribusi pendapatan. Isu mendasar pada negara miskin bukan hanya bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi namun juga siapa yang membuat “kue nasional” itu tumbuh, segelintir orang ataukah banyak orang. Bila pertumbuhan terutama disumbangkan oleh golongan kaya, maka merekalah yang paling mendapat manfaat dari pertumbuhan, sementara kemiskinan dan distribusi pendapatan semakin memburuk. Namun, bila pertumbuhan disumbang oleh banyak orang, maka buah dari pertumbuhan ekonomi akan dirasakan secara lebih merata (Kuncoro,2003).

Kemiskinan di Indonesia tiap provinsinya sangat beragam, namun sebagian besar masih berada pada beberapa provinsi di Pulau Jawa. Urutan provinsi dengan jumlah penduduk miskin pertama, kedua ketiga pada Tabel 1 adalah dari Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Tengah, dan Provinsi Jawa Barat.

Tabel 1
Sepuluh Besar Provinsi di Indonesia
dengan Jumlah Penduduk Miskin Terbanyak Tahun
2014 (Dalam Ribu Jiwa)

No	Provinsi	Jumlah Penduduk Miskin
1	Jawa Timur	4.748,42
2	Jawa Tengah	4.561,83
3	Jawa Barat	4.238,96
4	Sumatera Utara	1.360,60
5	Lampung	1.143,93
6	Sumatera Selatan	1.085,80
7	Nusa Tenggara Timur	991,88
8	Aceh	864,11
9	Papua	837,42
10	Nusa Tenggara Barat	816,62

Sumber : BPS, 2014 (data diolah).

Pada Tabel 1 dapat dilihat jumlah penduduk miskin Jawa Tengah pada tahun 2014 berada di urutan kedua di Indonesia, yakni setelah Provinsi Jawa Timur dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 4.561.830 jiwa. Meskipun jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah menempati posisi kedua, namun jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah cenderung mengalami penurunan dari tahun 2009-2013. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2
Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2009 – 2013 (dalam ribu jiwa)

No	Tahun	Jumlah Penduduk Miskin
1	2009	5.655,41
2	2010	5.217,20
3	2011	5.256,00
4	2012	4.863,50
5	2013	4.811,30

Sumber : BPS, 2013 (data diolah)

Tabel 2 menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah pada tahun 2009 sebanyak 5,655,410 jiwa, pada tahun 2010 berkurang menjadi 5,217,200 jiwa, namun pada tahun 2011 bertambah menjadi 5,256,000 jiwa dan kembali berkurang pada tahun 2012 dan 2013 secara berturut-turut yakni 4.863.500 jiwa dan 4.811.300 jiwa, Penurunan terbanyak yakni dari tahun 2009 ke tahun 2010, yakni berkurang sebesar 438.210 jiwa. Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 29 kabupaten dan 6 kota. Jumlah penduduk miskin di kota cenderung lebih rendah dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin di kabupaten. Dapat dilihat pada Tabel 3 bahwa 5 kota menempati posisi terendah, yakni dengan jumlah penduduk miskin yang sedikit.

Tabel 3
Sepuluh Besar Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah dengan Jumlah Penduduk Miskin Terendah
Tahun 2013
(Dalam Ribu Jiwa)

	Kota/Kabupaten	Jumlah Penduduk Miskin
1	Kota Salatiga	11,5
2	Kota Magelang	11,8
3	Kota Tegal	21,6
4	Kota Pekalongan	24,1
5	Kota Surakarta	59,7
6	Kabupaten Kudus	70,1
7	Kabupaten Semarang	83,2
8	Kabupaten Sukoharjo	84,1
9	Kota Semarang	86,7
10	Kabupaten Batang	87,5

Sumber : BPS, 2014 (data diolah)

Tabel 3 merupakan tabel yang menggambarkan sepuluh besar kota/kabupaten di Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah penduduk miskin terendah. Dapat dilihat pada tabel, 5 kota di Jawa Tengah menempati lima besar penduduk miskin terendah, sedang satu kota lainnya menempati posisi kesembilan. Hal ini menggambarkan di Provinsi Jawa Tengah jumlah penduduk miskin di kabupaten cenderung lebih banyak daripada jumlah penduduk miskin di kota.

Masalah kemiskinan belum dapat teratasi secara optimal juga diakibatkan karena faktor penyebab kemiskinan yang beragam dan kompleks. Faktor yang mempengaruhi kemiskinan bukan hanya faktor ekonomi saja. Dengan melihat faktor kemiskinan maka dapat diketahui cara untuk meminimalisir kemiskinan tersebut. Beberapa diantaranya adalah : Pendapatan per kapita, pengangguran, modal manusia (dapat dilihat dari nilai Indeks Pembangunan Manusia), dan pertumbuhan penduduk (Chandra,2010; Mahsunah,2011; Budhi,2013; Rusdiarti,2013; Leasiwal,2013; Abebe,2014; Cholili,2014; Marmujiono,2014).

Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 29 kabupaten dan 6 kota. Dalam beberapa aspek terdapat beberapa perbedaan karakteristik antara kabupaten dan kota. Dari aspek luas wilayah, wilayah kabupaten relatif lebih luas daripada kota. Di wilayah kota tidak terdapat desa. hanya dibentuk dari kecamatan dan kelurahan. Sedangkan di wilayah kabupaten terdapat kecamatan, kelurahan dan desa. Dari aspek sosial budaya, penduduk kota memiliki tingkat pendidikan dan kesehatan yang lebih baik. Hal ini karena fasilitas publik yang juga lebih baik daripada di kabupaten. Dari aspek perekonomian, rata-rata Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) kota juga lebih besar dari kabupaten. Hal ini berimplikasi pada poporsi sumber Pendapatan Asli

Daerah (PAD) yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah. Aktivitas ekonomi dan pendapatan di kota juga lebih besar daripada di kabupaten (PP No. 38/2007).

Perbedaan antara kabupaten dan kota dalam beberapa aspek di atas dapat berpengaruh terhadap banyaknya jumlah penduduk miskin. Dalam hal ini masalah kemiskinan di kabupaten lebih kompleks, karena jangkauan kemiskinan yang luas. Meskipun demikian, fasilitas publik yang ada di kabupaten masih kalah dengan fasilitas publik yang ada di kota, selain itu bagi masyarakat yang tinggal di desa terpencil akan susah untuk mengakses pelayanan tersebut. Luasnya daerah kabupaten juga menjadi kendala untuk tersebarnya infrastruktur secara merata, karena membutuhkan dana yang lebih besar daripada pembangunan infrastruktur di kota yang cenderung lebih sempit daripada kabupaten (UU No. 22/1999).

Berdasarkan studi pustaka, diduga faktor yang memengaruhi jumlah penduduk miskin ialah : pendapatan per kapita dan indeks pembangunan manusia, tingkat pengangguran terbuka dan pertumbuhan penduduk. Dari uraian di atas maka dapat disusun pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah variabel pendapatan per kapita berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin di 29 kabupaten di Jawa Tengah?
2. Apakah variabel pengangguran berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin di 29 kabupaten di Jawa Tengah?
3. Apakah variabel indeks pembangunan manusia berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin di 29 kabupaten di Jawa Tengah?
4. Apakah variabel pertumbuhan penduduk berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin di 29 kabupaten di Jawa Tengah?
5. Variabel manakah yang memiliki tingkat elastisitas paling tinggi?

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan metode *survey*. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran secara faktual dan akurat mengenai fakta, sifat serta hubungan antarfenomena yang diselidiki. Metode *survey* adalah metode yang untuk memperoleh fakta yang ada dan mencari keterangan secara faktual baik tentang institusi sosial, ekonomi, atau politik dari suatu kelompok ataupun suatu daerah (Nazir, 2014).

2. Ruang Lingkup Penelitian

Cakupan penelitian ini adalah seluruh kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yaitu 29 Kabupaten, dengan series data tahun 2009 sampai 2013 dengan jumlah keseluruhan 290 data panel yang

merupakan penggabungan data *cross section* dan *time series*.

3. Teknik Pengambilan Data

Studi pustaka dan dokumentasi, yaitu studi pustaka dengan mencari teori dan hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini. Studi dokumentasi dilakukan dengan mempelajari dokumen-dokumen atau data yang dibutuhkan kemudian dicatat dan dilakukan oleh data (Nazir, 2014).

4. Definisi Operasional

a. Kemiskinan

adalah keseluruhan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan (pada 29 kabupaten di Jawa Tengah) yang menetap di wilayah kabupaten di Jawa Tengah yang lebih dari 6 bulan maupun kurang dari 6 bulan namun berniat untuk menetap yang diambil dari Badan Pusat Statistik dan disajikan dalam satuan ribu jiwa. Data garis kemiskinan menurut kabupaten, dapat dilihat pada lampiran 10.

b. Pendapatan per kapita

adalah pendapatan rata-rata masyarakat pada masing-masing kabupaten yang di peroleh dari:

$$\frac{PDRB \text{ harga konstan tahun}_t}{\text{Jumlah penduduk tahun}_t}$$

c. Pengangguran

adalah tingkat pengangguran terbuka pada 29 kabupaten di Jawa Tengah yang diambil dari Badan Pusat Statistik dan disajikan dalam satuan persen.

d. IPM

adalah nilai indeks pembangunan manusia dari masing-masing kabupaten di Jawa Tengah yang diambil dari Badan Pusat Statistik dan disajikan dalam satuan persen.

e. Pertumbuhan penduduk

adalah perkembangan penduduk pada 29 kabupaten dari tahun ke tahun, yang diperoleh dari :

$$\frac{\text{Jumlah Penduduk Tahun}_t - \text{Jumlah Penduduk Tahun}_{t-1}}{\text{Jumlah Penduduk Tahun}_{t-1}}$$

5. Alat Analisis

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi data panel. Model regresi data panel dalam penelitian ini yaitu menggunakan variabel dependen Jumlah Penduduk Miskin, sedangkan variabel independennya adalah pendapatan per kapita, pengangguran, IPM, dan pertumbuhan penduduk. Jika di tulis dalam fungsi matematis, sebagai berikut:

$$Y = f(X_1, X_2, X_3, X_4)$$

Keterangan :

- Y : jumlah penduduk miskin
 X₁ : pendapatan per kapita
 X₂ : pengangguran
 X₃ : IPM
 X₄ : pertumbuhan penduduk

selanjutnya model tersebut dapat dinyatakan ke dalam bentuk model log linear melalui transformasi terhadap variabelnya.

Data panel dianalisis menggunakan model *fixed effect* dan *random effect* kemudian dari kedua model tersebut akan dipilih model terbaik yakni menggunakan Uji Hausman. Uji hausman ini didasarkan pada asumsi bahwa metode OLS tidak efisien. Jika hasil uji hausman signifikan (*probability* dari hausman < 0,05) maka model *fixed effect* lebih baik untuk digunakan, dan jika hasilnya tidak signifikan (*probability* dari hausman > 0,05) maka estimasi data di rekomendasikan menggunakan *random effect* untuk mendapat hasil yang lebih baik (Widarjono, 2009).

Selanjutnya sebelum pengujian hipotesis, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi : uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi serta uji heteroskedastisitas. Untuk menguji hipotesis satu sampai dengan hipotesis empat dalam penelitian ini, peneliti melakukan uji-t dengan $\alpha = 0,05$. Sedang untuk menguji hipotesis lima, peneliti melakukan uji elastisitas. Uji ini bertujuan untuk mengukur variabel independen yang paling berpengaruh. Model jangka panjang maupun jangka pendek menggunakan log linear untuk mengetahui elastisitas setiap variabel bebas. Variabel dengan koefisien terbesar adalah variabel yang paling berpengaruh, tetapi jika variabel tidak signifikan meskipun koefisiennya paling besar tidak dapat diikutsertakan (Gujarati, 2011).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis regresi data panel digunakan untuk mengetahui pengaruh pendapatan perkapita, TPT,

IPM, dan pertumbuhan penduduk sebagai variabel independen terhadap kemiskinan pada 29 kabupaten di Jawa Tengah sebagai variabel dependen. Analisis regresi data panel menggunakan program Eviews 8 menggunakan pendekatan *random effect* diperoleh hasil yang dapat ditunjukkan pada Tabel 6.

Persamaan Model Regresi *Random Effect*

$$\hat{Y} = 9,8256 - 0,3267 \ln X_1 + 0,0060 X_2 - 0,0499 X_3 - 0,0009 X_4$$

Keterangan :

- Y = Kemiskinan
 X₁ = Pendapatan per kapita
 X₂ = TPT
 X₃ = IPM
 X₄ = Pertumbuhan Penduduk

Dari persamaan regresi data panel yang diperoleh dapat diketahui koefisien pendapatan perkapita sebesar -0,3267 berarti bahwa setiap peningkatan pendapatan perkapita sebesar 1 persen akan menyebabkan penurunan kemiskinan sebesar 0,3267 persen. Sedangkan IPM memiliki koefisien sebesar -0,0499 berarti bahwa setiap peningkatan IPM sebesar satu persen maka akan menyebabkan penurunan kemiskinan sebesar 0,0499 persen. Pertumbuhan penduduk memiliki koefisien sebesar -0,0009 berarti bahwa setiap peningkatan pertumbuhan penduduk sebesar satu persen maka akan menyebabkan penurunan kemiskinan sebesar 0,0009 persen.

Tingkat pengangguran terbuka memiliki koefisien sebesar 0,006 berarti bahwa setiap peningkatan pengangguran satu persen maka akan menyebabkan peningkatan kemiskinan sebesar 0,006 persen. Interpretasi dari hasil regresi pengaruh pendapatan perkapita, TPT, IPM, dan pertumbuhan penduduk terhadap kemiskinan pada 29 kabupaten di Jawa Tengah tahun 2009-2013 adalah sebagai berikut :

Tabel 6
Output Hasil Regresi Data Panel *Random Effect*

Variabel	Koefisien	t-hitung	Prob kesalahan
C	9,825637	18,33400	0,0000
X1	- 0,326706	- 3,063453	0,0026
X2	0,006000	1,999141	0,0475
X3	- 0,049895	- 4,279840	0,0000
X3	- 0,000922	- 1,224173	0,2229
F Hitung	: 61,7		
Adj R ²	: 0,63		
N	: 145		

1. Pengaruh Pendapatan Perkapita terhadap Kemiskinan

Berdasarkan hasil uji t bahwa t hitung $|3,063| > t$ tabel (1,960) dengan demikian H_0 ditolak atau H_1 diterima dengan tingkat signifikansi sebesar 0,0026. Artinya, variabel pendapatan perkapita secara parsial berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah. Variabel pendapatan perkapita memiliki pengaruh negatif yaitu sebesar 0,3267 artinya bahwa setiap kenaikan pendapatan perkapita sebesar satu persen akan menurunkan jumlah penduduk miskin sebesar 0,3267persen. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pendapatan perkapita menunjukkan tanda negatif dan berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah.

Hasil penelitian sesuai dengan hipotesis yang diajukan, maka hipotesis penelitian diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Chandra,dkk (2010) yang menunjukkan pendapatan perkapita berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2003-2010. Pendapatan perkapita merupakan salah satu ukuran kemakmuran bagi tiap daerah. Semakin tinggi pendapatan tersebut maka semakin tinggi daya beli penduduk, dan daya beli yang bertambah ini akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Sukirno,2006).

2. Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Kemiskinan

Berdasarkan hasil uji t bahwa t hitung $|1,999| > t$ tabel (1,960) dengan demikian H_0 ditolak atau H_2 diterima dengan tingkat signifikansi sebesar 0,047. Artinya, variabel tingkat pengangguran terbukasecara parsial berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah. Variabel TPT memiliki pengaruh positif yaitu sebesar 0,006 artinya bahwa setiap kenaikan TPT sebesar satu persen akan menurunkan jumlah penduduk miskin sebesar 0,006 persen. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel tingkat pengangguran terbukamenunjukkan tanda positif dan berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah.

Hasil penelitian sesuai dengan hipotesis yang diajukan, maka hipotesis penelitian diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Mahsunah (2011) dan Cholili (2014) yang menunjukkan TPT berpengaruh positif terhadap kemiskinan. Arsyad (2010) juga menyatakan bahwa bagi para tenaga kerja yang tidak mempunyai pekerjaan tetap, atau hanya bekerja paruh waktu selalu berada di antara kelompok masyarakat miskin. Masyarakat miskin pada umumnya menghadapi permasalahan keterbatasan kesempatan kerja serta keterbatasan modal untuk pengembangan usaha.

3. Pengaruh IPM terhadap Kemiskinan

Berdasarkan hasil uji t bahwa t hitung $|4,279| > t$ tabel (1,960) dengan demikian H_0 ditolak atau H_3 diterima dengan tingkat signifikansi sebesar 0,0026. Artinya, variabel IPM secara parsial berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah. Variabel IPM memiliki pengaruh negatif yaitu sebesar 0,0498 artinya bahwa setiap kenaikan IPM sebesar satu persen akan menurunkan jumlah penduduk miskin sebesar 0,0498 persen. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel IPM menunjukkan tanda negatif dan berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah.

Hasil penelitian sesuai dengan hipotesis yang diajukan, maka hipotesis penelitian diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Cholili (2014). Hal ini selaras dengan pernyataan Arsyad (2010) salah satu strategi pengentasan kemiskinan adalah dengan pembangunan sumber daya manusia. Perbaikan akses terhadap konsumsi pelayanan sosial (pendidikan, kesehatan dan gizi) merupakan alat kebijakan penting dalam strategi pemerintah secara keseluruhan untuk mengurangi angka kemiskinan dan memperbaiki kesejahteraan penduduk Indonesia. IPM merupakan ukuran untuk pembangunan manusia secara relatif, apabila IPM meningkat berarti kesejahteraan masyarakat juga meningkat, dengan demikian kemiskinan menurun.

4. Pengaruh Pertumbuhan Penduduk terhadap Kemiskinan

Berdasarkan hasil uji t bahwa t hitung $|1,2241| < t$ tabel (1,960) dengan demikian H_0 diterima atau H_4 ditolak dengan tingkat signifikansi sebesar 0,2229. Artinya, variabel pertumbuhan penduduk secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah. Variabel pertumbuhan penduduk memiliki pengaruh negatif yaitu sebesar 0,0009 artinya bahwa setiap kenaikan pertumbuhan penduduk sebesar satu persen akan menurunkan jumlah penduduk miskin sebesar 0,0009 persen. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pertumbuhan penduduk menunjukkan tanda negatif dan berpengaruh tidak signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah.

Hasil penelitian sesuai dengan hipotesis yang diajukan, maka hipotesis penelitian diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Mahsunah (2011). Penelitian ini juga selaras dengan Nelson dan Leibenstein yang mengemukakan bahwa masalah pertumbuhan penduduk terjadi apabila pertumbuhan penduduk tidak diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi. Namun dalam penelitian ini tingkat pertumbuhan penduduk lebih kecil dari tingkat pertumbuhan ekonomi sehingga pertumbuhan penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Tengah (lampiran 2)

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi Kemiskinan pada 29 kabupaten di Jawa Tengah periode tahun 2009-2013, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Apabila pendapatan per kapita meningkat, maka jumlah penduduk miskin akan menurun.
2. Apabila tingkat pengangguran terbuka meningkat, maka jumlah penduduk miskin juga akan meningkat.
3. Apabila indeks pembangunan manusia meningkat, maka jumlah penduduk miskin akan menurun.
4. Apabila pertumbuhan penduduk meningkat, maka jumlah penduduk miskin akan meningkat, namun peningkatannya tidak signifikan (pengaruhnya tidak terlalu besar).
5. Variabel pendapatan perkapita memiliki koefisien paling besar, sehingga variabel pendapatan perkapita adalah variabel yang memiliki elastisitas paling besar (yang paling memengaruhi jumlah penduduk miskin dibandingkan dengan tiga variabel lainnya).

Sesuai dengan kesimpulan hasil penelitian dapat diajukan saran yang dapat digunakan sebagai rekomendasi kebijakan:

1. Untuk menurunkan jumlah penduduk miskin, maka perlu meningkatkan pendapatan perkapita. Salah satu hal yang dapat dilakukan adalah mengadakan program tepat sasaran yang menitik beratkan pada masyarakat miskin, misalnya dengan mengembangkan industri rumah tangga. Untuk mengembangkan industri rumah tangga tersebut melalui pelatihan pengolahan hasil pertanian sesuai dengan potensi yang dimiliki pada tiap daerah. Dengan adanya pengolahan, maka akan meningkatkan harga jual serta manfaat yang lebih tinggi.
2. Untuk menurunkan jumlah penduduk miskin, maka tingkat pengangguran terbuka perlu diturunkan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan pemerintah yaitu dengan kebijakan moneter longgar, yakni dengan menurunkan tingkat suku bunga acuan. Dengan demikian maka suku bunga bank akan turun, sehingga para produsen diharapkan dapat memacu para produsen untuk melakukan pinjaman guna ekspansi usaha karena biaya pinjaman dari bank semakin berkurang. Bila hal ini terjadi, maka memungkinkan penyerapan tenaga kerja semakin meningkat, tingkat pengangguran terbuka berkurang serta peningkatan kesejahteraan.
3. Variabel Indeks Pembangunan Manusia yang berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin mengindikasikan bahwa faktor kesehatan, pendidikan serta daya beli

masyarakat perlu ditingkatkan oleh pemerintah. Pemerintah juga dapat memberikan pelayanan di sektor pendidikan secara gratis khususnya bagi masyarakat miskin. Sehingga kualitas SDM lebih meningkat yang diharapkan dapat menurunkan jumlah penduduk miskin. Perhatian pemerintah terhadap kesehatan juga masih perlu ditingkatkan dengan pelayanan kesehatan gratis, memperbanyak puskesmas khususnya pada masyarakat desa miskin dan tertinggal.

4. Variabel pertumbuhan penduduk berpengaruh positif namun tidak signifikan. Hal ini salah satunya adalah karena kualitas sumber daya manusia yang semakin baik (dapat dilihat dari nilai IPM yang semakin meningkat). Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) perlu lebih memperhatikan laju pertumbuhan penduduk di desa, karena angka kelahiran di desa lebih besar dari pada di kota, sehingga fokus utama penanaman KB lebih baik dilakukan di desa. Mislanya, memberikan tanggung jawab terhadap bidan desa menjadi duta keluarga berencana, sehingga bidan desa bisa memberikan pelayanan dan konsultan terhadap masyarakat awam yang belum mengenal KB.

DAFTAR PUSTAKA

- Abebe, T. dan Nana Q. 2014. Causes of Poverty in Sub-Saharan Africa: A Layered Theory Approach to Understanding Significant Factors. *Journal of Economics and International Finance* Vol. 6 (6).
- Arsyad, L. 2010. *Ekonomi Pembangunan. Edisi Kelima*. STIM YKPN, Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik. 2009. *Data dan Informasi Kemiskinan 2009*. Badan Pusat Statistik, Jawa Tengah.
- Badan Pusat Statistik. 2009. *Jawa Tengah dalam Angka 2009*. Badan Pusat Statistik, Jawa Tengah.
- Badan Pusat Statistik. 2010. *Data dan Informasi Kemiskinan 2010*. Badan Pusat Statistik, Jawa Tengah.
- Badan Pusat Statistik. 2010. *Jawa Tengah dalam Angka 2010*. Badan Pusat Statistik, Jawa Tengah.
- Badan Pusat Statistik. 2011. *Data dan Informasi Kemiskinan 2011*. Badan Pusat Statistik, Jawa Tengah.
- Badan Pusat Statistik. 2012. *Analisis Kualitas Pembangunan Manusia Jawa Tengah*. Badan Pusat Statistik, Jawa Tengah.

- Badan Pusat Statistik. 2012. *Data dan Informasi Kemiskinan 2012*. Badan Pusat Statistik, Jawa Tengah.
- Badan Pusat Statistik. 2013. *Data dan Informasi Kemiskinan 2013*. Badan Pusat Statistik, Jawa Tengah.
- Badan Pusat Statistik. 2014. *Angka Harapan Hidup Jawa Tengah per Kabupaten/Kota Tahun 1996-2013*. Badan Pusat Statistik, Jawa Tengah.
- Badan Pusat Statistik. 2014. *Angka Kemiskinan Jawa Tengah per Kabupaten/Kota Tahun 1996-2013*. Badan Pusat Statistik, Jawa Tengah.
- Badan Pusat Statistik. 2014. *Jawa Tengah dalam Angka 2014*. Badan Pusat Statistik, Jawa Tengah.
- Badan Pusat Statistik. 2014. *Jumlah Penduduk Jawa Tengah per Kabupaten/Kota Tahun 1993-2013*. Badan Pusat Statistik, Jawa Tengah.
- Badan Pusat Statistik. 2014. *Pengeluaran Perkapita (d disesuaikan) Jawa Tengah per Kabupaten/Kota Tahun 1996-2013*. Badan Pusat Statistik, Jawa Tengah.
- BAPPEDA. 2014. *Buku Saku Kemiskinan*. BAPPEDA, Cilacap.
- BAPPEDA. 2014. *Kemiskinan menurut BPS*. BAPPEDA, Cilacap.
- Chandra, A. 2010. Keterkaitan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Per Kapita terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah Tahun 2003-2010. *Jurnal Media Ekonomi & Teknologi Informasi Vol. 20 No.2*.
- Cholili, F.M. 2014. *Analisis Pengaruh Pengangguran, PDRB dan IPM terhadap Jumlah Penduduk Miskin (studi kasus: 33 Provinsi di Indonesia)*. Universitas Brawijaya, Malang.
- Gujarati, D. N. 2011. *Dasar-Dasar Ekonometrika. Edisi Kesatu*. Salemba Empat, Jakarta.
- Kuncoro, M. 2003. *Ekonomi Pembangunan. Edisi Ketiga*. AMP YKPN, Yogyakarta.
- Leasiwal, T.C. 2013. Determinan dan Karakteristik Kemiskinan di Provinsi Maluku. *Jurnal Ekonomi Vol. VII. No. 2*.
- Mahsunah, D. 2011. *Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan dan Pengangguran terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur*. Universitas Negeri Surabaya, Surabaya.
- Marmujiono, S.P. 2014. Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Tingkat Kemiskinan dan Strategi Pengentasan Kemiskinan di Kab. Brebes Tahun 2009-2011. *Economics Development Analysis Journal Vol. 3. No. 1*.
- PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- Rusdarti dan L.K. Sebayang. 2013. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Economia Vol. 9. No. 1*.
- Sukirno, S. 2006. *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan*. Kencana, Jakarta.
- Widarjono, A. 2009. *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya*. Ekonosia, Yogyakarta.

Lampiran 1. Garis Kemiskinan Menurut BPS (Dalam Rupiah)

Kabupaten	Th.2009	Th.2010	Th.2011	Th.2012	Th.2013
Cilacap	191.167	206.714	224.530	240.025	256.615
Banyumas	208.583	225.546	249.807	271.800	295.742
Purbalingga	194.529	210.349	230.461	247.508	265.262
Banjarnegara	160.345	173.385	192.303	205.369	221.056
Kebumen	195.589	211.495	234.005	250.413	267.763
Purworejo	194.292	211.400	235.459	254.314	273.481
Wonosobo	187.932	203.216	226.827	242.047	258.522
Magelang	169.158	184.053	204.430	218.950	235.430
Boyolali	195.538	209.495	223.755	235.399	247.845
Klaten	241.608	258.854	275.002	296.530	315.566
Sukoharjo	211.928	227.055	240.711	259.184	279.400
Wonogiri	182.083	195.080	207.496	221.019	235.728
Karanganyar	202.500	216.954	236.093	255.072	275.865
Sragen	192.530	206.273	222.267	234.254	247.495
Grobogan	205.468	223.560	242.212	260.435	278.786
Bloro	174.951	190.356	206.016	221.088	237.850
Rembang	200.216	217.846	240.859	261.156	284.160
Pati	224.390	244.149	264.372	288.271	314.609
Kudus	218.411	237.643	256.745	276.317	299.097
Jepara	206.549	224.737	242.963	263.266	285.287
Demak	210.260	228.774	254.441	276.041	299.773
Semarang	189.612	206.308	227.471	244.762	263.352
Temanggung	164.343	178.814	198.888	212.487	229.548
Kendal	199.020	216.545	234.475	253.276	275.016
Batang	155.558	169.256	184.592	195.983	208.671
Pekalongan	210.168	228.674	249.958	270.026	293.039
Pemalang	198.295	216.365	235.316	251.986	271.861
Tegal	187.048	204.093	222.700	239.207	258.366
Brebes	219.119	239.086	261.160	281.601	307.238
Rata-rata	196.248	212.263	231.907	249.234	268.359

Lampiran 2. Perbandingan Perumbuhan Penduduk dan Pertumbuhan Ekonomi Per Kabupaten

Kabupaten	Th.2009		TH.2010		Th.2011		Th.2012		Th.2013	
	PE	PP	PE	PP	PE	PP	PE	PP	PE	PP
Cilacap	5,25	0,19	5,65	0,75	5,78	0,47	5,59	0,69	5,75	1,02
Banyumas	5,49	0,46	5,77	2,94	5,95	0,69	5,88	1,09	6,71	1,41
Purbalingga	5,89	0,73	5,67	1,77	6,03	0,75	6,26	1,21	5,66	1,53
Banjarnegara	5,11	0,62	4,89	-0,71	4,92	0,54	5,25	0,81	5,28	1,13
Kebumen	3,94	0,55	4,15	-5,12	4,23	0,22	5,59	0,58	4,20	0,87
Purworejo	4,96	0,37	5,01	-4,08	5,02	0,22	5,04	0,47	4,99	0,98
Wonosobo	4,02	0,41	4,29	-0,78	4,52	76,62	5,14	-42,76	4,98	0,96
Magelang	4,72	0,80	4,51	0,13	4,27	0,71	5,84	1,13	5,60	1,43
Boyolali	5,16	0,59	3,60	-1,42	5,28	0,51	5,66	0,76	5,43	1,11
Klaten	4,24	0,34	1,73	-0,60	1,96	0,40	5,54	0,55	5,79	0,92
Sukoharjo	4,76	0,83	4,65	-1,12	4,59	0,65	5,03	1,02	5,01	1,35
Wonogiri	4,73	0,23	5,87	-5,70	2,24	0,22	5,87	0,46	4,36	1,00
Karanganyar	5,54	0,83	5,42	-0,73	5,50	0,69	5,82	1,10	5,39	1,43
Sragen	6,01	0,28	6,09	-0,54	6,53	0,38	6,60	0,52	6,64	0,90
Grobogan	5,03	0,72	5,05	-2,76	3,59	0,48	6,16	0,70	4,59	1,05
Blora	5,08	0,36	5,19	-1,01	2,59	0,41	5,00	0,58	4,91	0,95
Rembang	4,46	0,45	4,45	2,27	4,40	0,51	4,88	1,23	5,03	1,19
Pati	4,69	0,31	5,11	1,34	5,43	0,50	5,92	0,74	5,72	1,12
Kudus	3,95	1,44	4,17	-2,53	4,21	0,86	4,33	1,42	4,68	1,73
Jepara	5,02	1,57	4,52	-0,97	5,44	0,87	5,79	1,97	5,77	1,83
Demak	4,08	0,84	4,12	1,21	4,48	0,76	4,64	1,22	4,62	1,54
Semarang	4,37	1,17	4,90	0,96	5,56	0,92	6,02	1,54	5,62	1,85
Temanggung	4,09	0,95	4,31	-0,82	4,65	0,70	5,04	1,10	5,02	1,41
Kendal	5,58	1,45	5,97	-6,78	5,99	0,64	5,54	0,99	5,24	1,29
Batang	3,72	0,51	4,97	3,02	5,26	0,68	5,02	1,08	5,17	1,39
Pekalongan	4,30	0,85	4,27	-2,37	4,77	0,58	5,32	0,89	5,45	1,22
Pemalang	4,78	1,17	4,94	-9,34	4,83	0,30	5,28	0,48	5,41	0,90
Tegal	5,29	0,35	4,83	-1,81	4,81	0,35	5,25	0,48	5,81	0,85
Brebes	4,99	0,69	4,94	-3,73	4,97	0,42	5,21	0,60	5,06	0,92
Rata-Rata	4,80	0,69	4,79	-1,32	4,75	3,17	5,46	-0,59	5,30	1,21